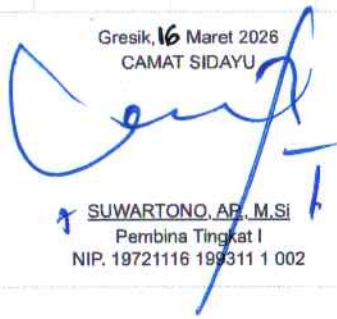


**RENCANA AKSI
KECAMATAN SIDAYU
TAHUN 2026**

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat						
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan				
1.1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan di tingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan				
1.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan				
1.1.1.1	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina				
1.1.1.1.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang melaksanakan pembinaan dan pelatihan PKK (Pos PAUD), Karang Taruna				
	a. Pembinaan Karang Taruna Desa	Jumlah kegiatan pembinaan Karang Taruna	-	-	1	-
	b. Monitoring pendanaan pendidikan Pos PAUD dan Karang Taruna di perdesaan	Laporan hasil evaluasi dan movev APBDes	-	-	-	1
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan				
2.1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan di tingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan				
2.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan program prioritas bidang kesehatan				
2.1.1.1	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina				
2.1.1.1.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang melaksanakan pembinaan UKS dan Posyandu				
	a. Rapat Koordinasi UKS	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi UKS	-	1	-	-
	b. Monitoring pendanaan kesehatan di perdesaan	Laporan hasil evaluasi dan movev APBDes	-	-	-	1
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan				
3.1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan				
3.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan program prioritas di bidang perlindungan anak				
3.1.1.1	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina				
3.1.1.1.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa yang melaksanakan pembaian/sosialisasi desa ramah perempuan dan ramah anak di tingkat desa				
	a. Monitoring pendanaan perlindungan anak di perdesaan	Laporan hasil evaluasi dan movev APBDes	-	-	-	1
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
4.1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan pedesaan				
4.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang melaksanakan program prioritas bidang pemberdayaan perempuan di kawasan pedesaan				
4.1.1.1	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina				
4.1.1.1.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang melaksanakan pembinaan PKK Desa				
	a. Pembinaan/Pelatihan PKK Desa oleh TP PKK Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan/pelatihan PKK Desa oleh TP PKK Kecamatan	1	4	5	6
	b. Monitoring desa yang melaksanakan pembinaan PKK	Laporan hasil monitoring desa yang melaksanakan pembinaan PKK	1	1	1	1
	c. Monitoring pendanaan pemberdayaan perempuan di pedesaan	Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes	-	-	-	1
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Rasio Belanja Infrastruktur Desa				
5.1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur di tingkat desa/kelurahan	Rasio belanja infrastruktur desa				
5.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan Program prioritas bidang infrastruktur desa				
5.1.1.1	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa				
5.1.1.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musrenbangdes				
	a. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	120	-	-	-
	b. Monitoring pendanaan infrastruktur di pedesaan	Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes	-	-	-	1
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa				
6.1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana di tingkat desa/kelurahan	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa				
6.1.1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang melaksanakan program prioritas di bidang penanggulangan bencana				
6.1.1.1	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				
6.1.1.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instransi Verifitakl di wilayah Kecamatan Sidayu				
	a. Rapat Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instransi Verifitakl di wilayah Kecamatan Sidayu	Jumlah laporan kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instransi Verifitakl di wilayah Kecamatan Sidayu	1	1	1	1
	b. Monitoring pendanaan penanggulangan bencana di pedesaan	Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes	-	-	-	1
7	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
7.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
7.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				
7.1.1.1	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Jumlah SDM pelayanan publik di Kecamatan Sidayu yang mendapat pembinaan				
7.1.1.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pelayanan publik				
	a. Melaksanakan Kepuasan Masyarakat secara berkala, dengan metodologi yang transparan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan perbaikan layanan melalui aplikasi SUKMAe JATIM	Laporan hasil IKM SUKMAe JATIM	98,51	98,51	98,51	98,51
			Gresik, 16 Maret 2026 CAMAT SIDAYU  SUWARTONO, AR., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19721116 199311 1 002			